

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Abdullah, Rozali. 1991. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Alrasyid, Harun. 1999. *Pengisian Jabatan Presiden*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Asshiddiqie, Jimly. 2009. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Garafika.
- Arumadi, Bambang dan Susanto, 1990. *Konsepsi Negara Hukum Menurut UUD 1945*, Semarang: IKIP Semarang Press.
- Azhary, Muhammad Tahir. 2010. *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Basah, Sjachran. 1989. *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*. Alumni Bandung
- E., Utrecht. 1990. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru.
- _____. 1983. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Fuady, Munir. 2009. *Teori Negara Hukum Modern*, Bandung: Refika Aditama.
- H.R., Ridwan. 2011. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Handoyo, B. Hestu Cipto. 2003. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia)*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Harahap, Zairin. 2007. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Indroharto, 2005. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Buku III Pustaka Harapan.

- Ibrahim, Jhonny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Banyumedia Publising, Cetakan Kedua.
- Joeniarto. 1968. *Negara Hukum*, Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada.
- Logeman, J.H.A. 1948. *Over deTheorie van een Stelling Staatsrecht*. Leiden: Universe Pers. (terjemahan) Makkatutu. 1975. *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*. Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve.
- M.Hadjon, Philipus, et.al,. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- _____. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- M.D., Mahfud. 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta:Gama Media.
- Manan, Bagir. 2000. *Teori dan Politik Konstitusi*. Jakarta: Direjen Dikti Depdiknas.
- _____. 2004. *Hukum Positif Indonesia, Satu Kajian Teoritik*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana.
- Marbun, S.F. 1988. *Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- _____. 2002. *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta:UII Press.
- _____. dan Moh.Mahfud MD, 2009. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta:Liberty.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2004. *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004*, Bogor: Ghalia Indonesia Cetakan 1.
- Sibuea, Hotma P., 2010. *Asas Negara Hukum. Peraturan Kebijakan, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, PT. Gelora Aksara Pratama, Erlangga.
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press
- _____. dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT Raja grafindo Persada.

- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tjandra, W. Riawan. 2005. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Wiyono, R. 2013. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Edisi Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wijoyo, Suparto. 2005. *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara)*, Edisi Kedua, Surabaya: Airlangga University Press.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RI tahun 1986 Nomor 77); Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 35); Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 160)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *tentang Kekuasaan Kehakiman* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4282)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 *tentang Aparatur Sipil Negara* (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494)

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 *tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural* (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4018)

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 *tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil* (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5135)

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 *tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil* (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 63);

C. Sumber Lain

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 91/G/2016/PTUN-BDG.

Jimly Asshiddiqie. *Konsep Negara Hukum Di Indonesia*.

www.jimly.com/makalah/.../135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf.
df. Diakses pada tanggal 10 Juli 2017..

Kenyataan bahwa Indonesia adalah sebagai negara hukum demokratis dikemukakan oleh Bagir Manan, *Hubungan Anatara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945*, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1990.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua*. Jakarta: Balai Pustaka. 1991.

Yusdar, Irwansyah, *Rekonstruksi Hukum Lelang Jabatan Struktural Dalam Rangka Reformasi Birokrasi*. Papua Law Jurnal. Vol. 1, Issue 1, 2016.